



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANTEN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NEVI MUGIA SANTOSA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 542378

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 924.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/49 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 614.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 196.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
3. LAINNYA, THRILL MTB Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. LAINNYA, UNITED MTB Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
5. LAINNYA, SEPEDA LIPAT PACIFIC LUXOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.900.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 43.547.129**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.174.447.129**III. HUTANG** Rp. 561.747.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 612.700.129



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.